

**FAKTOR LEMAHNYA PENGAWASAN DINAS KELAUTAN DAN
PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU TERHADAP TINDAKAN
PENGAMBILAN PASIR LAUT DI PULAU KARAS KOTA BATAM
TAHUN 2020-2023**

**Oleh
Sarimah
NIM. 190565201017**

ABSTRAK

Pasir laut merupakan elemen penting bagi ekosistem pesisir. Oleh sebab itu, wilayah pesisir harus dijaga dan dirawat untuk kesejahteraan masyarakat di wilayah pesisir. Permasalahan yang terjadi di Pulau Karas, Kecamatan Galang Kota Batam adalah lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau khususnya Dinas Kelautan dan Perikanan terhadap kegiatan pengambilan pasir laut/pantai yang dilakukan masyarakat setempat secara terus menerus untuk kepentingan pribadi dan bahkan sebagai sumber mata pencaharian, sehingga menimbulkan dampak bagi lingkungan pesisir dan masyarakat di sekitarnya.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengawasan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau khususnya Dinas Kelautan dan Perikanan terhadap Tindakan pengambilan pasir laut/pantai di Pulau Karas. Penulis menggunakan teori dari Siagian yang terdiri dari Pengawasan Langsung yang dengan 3 indikator, yakni a. inspeksi langsung, b. observasi ditempat, c. laporan ditempat. dan pengawasan tidak langsung yang terdiri dari 2 indikator, yakni a. laporan lisan, b. laporan tertulis. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Penulis menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi demi memperoleh data untuk melihat pengawasan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau terhadap tindakan pengambilan pasir laut di Pulau Karas, Kota Batam

Hasil dari penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa faktor lemahnya pengawasan Dinas Kelautan dan Perikanan terhadap tindakan pengambilan pasir laut di Pulau Karas. Adapun faktor penyebab tidak dilakukannya pengawasan secara langsung, yakni minimnya informasi tentang pengambilan pasir laut yang menyebabkan kurangnya pemahaman tentang aktivitas tersebut. Akibatnya tidak ada langkah konkret yang dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan untuk mengontrol dan mengawasi pengambilan pasir tersebut. Kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kewenangan melakukan pengawasan. Kurangnya sarana dan prasarana seperti kapal pengawas, alat komunikasi dan lain-lain. Dan yang terakhir keterbatasan anggaran yang dialokasikan untuk melakukan pengawasan.

Kata Kunci: Pengawasan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Masyarakat, Pasir Laut

The Weakness Factors of Supervision by the Department of Marine and Fisheries of the Riau Islands Province on the Actions of Seabed Sand Mining on Karas Island, Batam City, 2020-2023

By
Sarimah
Student ID: 190565201017

ABSTRACT

The coastal sand is a crucial element for coastal ecosystems. Therefore, coastal areas must be preserved and maintained for the well-being of the community in those regions. The issue present in Pulau Karas, Galang Sub-district, Batam City, is the inadequate oversight conducted by the Provincial Government of the Riau Islands, especially the Department of Marine and Fisheries, concerning the continuous extraction of coastal/sea sand by the local community for personal gains and even livelihood purposes. This activity has resulted in adverse impacts on both the coastal environment and the surrounding community.

The objective of this research is to examine the oversight of the Riau Islands Provincial Government, particularly the Department of Marine and Fisheries, regarding the extraction of coastal/sea sand on Pulau Karas. The author employs Siagian's theory, which comprises Direct Supervision with three indicators: a. direct inspection, b. on-site observation, c. on-site reports; and Indirect Supervision with two indicators: a. oral reports, b. written reports. This study is conducted using a qualitative descriptive approach. The author employs interview, observation, and documentation techniques to gather data in order to assess the oversight of the Department of Marine and Fisheries of the Riau Islands regarding the extraction of coastal/sea sand on Pulau Karas, Batam City.

The findings of the conducted research indicate that the weak oversight of the Department of Marine and Fisheries contributes to the ongoing extraction of coastal sand on Pulau Karas. Factors leading to the lack of direct supervision include insufficient information about sand extraction, which leads to a lack of understanding about this activity. Consequently, the Department of Marine and Fisheries has not taken concrete steps to control and oversee this sand extraction. The scarcity of human resources with the authority to conduct oversight, along with the lack of necessary equipment such as surveillance vessels, communication tools, and others, further contribute to this issue. Lastly, budget constraints allocated for supervision have also played a role in limiting effective oversight.

Keyword: *Supervision, Ministry of Maritime Affairs and Fisheries, Community, Sea Sand*